BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi manusia dapat saling berhubungan satu sama lain baik dalam kehidupan sehari-hari dirumah tangga, ditempat pekerjaan, dipasar, dalam masyarakat atau dimana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak terlibat dalam komunikasi.

Bermacam-macam definisi komunikasi yang dikemukakan oleh para ahli untuk memberikan batasan terhadap apa yang dimaksud dengan komunikasi, sesuai dari sudut mana para ahli memandangnya. Komunikasi adalah proses penyampaian pikiran atau perasaan oleh seseorang kepada orang lain dengan menggunakan lambang-lambang yang bermakna bagi kedua pihak, dalam situasi yang tertentu komunikasi menggunakan media tertentu untuk merubah sikap atau tingkah laku seorang atau sejumlah orang sehingga ada efek tertentu yang diharapkan (Effendy, 2000 : 13).

Pentingnya komunikasi bagi manusia tidaklah dapat dipungkiri begitu juga halnya bagi suatu organisasi. Dengan adanya komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan lancar dan berhasil dan begitu pula sebaliknya, kurangnya atau tidak adanya komunikasi organisasi dapat macet atau berantakan. Adapun pengertian Komunikasi Organisasi ialah pengiriman dan penerimaan pesan baik dalam organisasi di dalam kelompok

formal maupun kelompok informal organisasi. Jadi, komunikasi organisasi dapat diartikan sebagai komunikasi yang terjadi antara orang-orang yang berada di dalam organisasi itu sendiri, juga di antara orang-orang yang berada di dalam organisasi dengan publik luar, dengan maksud untuk mencapai suatu tujuan.

Adapun persepsi komunikasi organisasi menurut Greenbaunm, mengatakan bahwa :

> Bidang komunikasi organisasi termasuk arus komunikasi formal dan informal dalam organisasi. Dia membedakan komunikasi internal dengan eksternal dan memandang peranan komunikasi terutama sekali sebagai koordinasi pribadi dan tujuan organisasi dan masalah menggiatkan aktivitas. (Muhammad : 2009 : 66)

Komunikasi memberikan sesuatu kepada orang lain dengan kontak tertentu atau dengan mempergunakan sesuatu alat. Banyak komunikasi terjadi dan berlangsung tetapi kadang-kadang tidak tercapai kepada sasaran tentang apa yang dikomunikasikan. Dimungkinkan adanya komunikasi yang baik antara pemberi pesan dan penerima pesan kalau terjalin persesuaian di antara keduanya.

Komunikasi organisasi dapat berjalan dengan baik apabila terdapat bagian yang bisa mengatasinya dan disini peran *Public Relation* atau Humaslah yang bisa mengatasinya. Adapun definisi *Public Relations* menurut Frank Jefkins dalam bukunya *Public Relations*, yaitu:

> "Humas adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu ke dalam maupun ke luar, antara suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian."
> (Jefkins, 1996 : 9).

Definisi di atas menjelaskan bahwa *Public Relations* merupakan suatu kegiatan komunikasi yang terencana dan memiliki tujuan-tujuan spesifik yang hendak dicapai. Publik sasarannya bukan hanya yang berada di dalam perusahaan, tetapi juga yang berada di luar perusahaan.

Setiap lembaga atau instansi tentu ingin berhasil mencapai tujuannya, keberhasilan tersebut tidak dapat dicapai hanya berdasarkan kemampuan yang ada pada lembaga itu saja. Di samping itu perlu adanya pengertian, penerimaan, dan keikutsertaan publiknya. Kegiatan - kegiatan yang dilakukan oleh PR internal, diantaranya adalah : Pembuatan media monitoring berita, Pembuatan *newsletter*, *Human Relations, Get together*, *Coffee/tea morning, Family gathering,* dan lain-lain. Sedangkan kegiatan – kegiatan yang dilakukan oleh PR eksternal, diantaranya adalah *Press relations,* Pelatihan atau Sosialisasi, Penerimaan Kunjungan, *Media visit* dan Pameran.

Adanya unit kehumasan pada setiap instansi pemerintah merupakan suatu keharusan fungsional dalam rangka penyebaran tentang aktivitas instansi tersebut baik ke dalam maupun ke luar. Petugas humas hendaknya memiliki sikap pelayanan yang terbuka pada khalayak. Mengingat masalah yang dihadapi sebagai bagian utama dari suatu lembaga atau instansi maka petugas humas seyogyanya memiliki keterampilan dan kemampuan yang memadai di bidang komunikasi dan mediasi serta memiliki kepekaan dan rasa proporsi yang baik, dalam menghadapi persoalan di lingkungan, baik *intern* publik maupun *ekstern* publik.

Tidak semua bagian humas diberbagai lembaga dapat memberikan pelayanan mengenai keterbukaan informasi khususnya keterbukaan informasi publik secara baik kepada masyarakat. Pada kenyataannya di setiap dinas-dinas masih belum mengetahui akan adanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) yang seharusnya dipahami agar dapat melayani masyarakat atau publik secara baik.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik berisi :

a. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional.
b. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan yang baik.
c. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik.
d. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini memuat pokok-pokok materi yang terdiri atas pengertian-pengertian yang terkait dengan informasi dan badan-badan publik, hak dan kewajiban badan publik, jenis-jenis informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi publik yang dikecualikan, hal-hal yang terkait dengan Komisi Informasi sebagai lembaga independen yang ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan undang-undang ini.

Dengan disahkannya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ini akan membawa nuansa perubahan yang sangat besar dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang diharapkan dapat mendorong percepatan terwujudnya tata kelola Pemerintahan yang baik (*Good Governance*), transparansi, akuntabilitas menuju tercapainya masyarakat yang sejahtera. Partisipasi dari berbagai komponen sangat diperlukan mulai dari perubahan *mindset* para pengelola badan-badan publik pemerintah maupun masyarakat sampai kepada penyediaan sarana prasarana yang dapat mendukung terlaksananya pelayanan informasi publik dengan baik.

Berlakunya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) ini tentunya memerlukan kegiatan sosialisasi untuk memberikan pemahaman yang utuh terhadap substansi Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik yang diharapkan seluruh badan publik dapat memahami dan melaksanakan amanat yang terkandung dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Karena masyarakat akan mengawasi kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah. Suatu organisasi apapun bentuknya dan bidang kegiatannya akan melibatkan komunikasi dalam penyebaran informasi. Hal ini tidak bisa dipungkiri lagi sebab telah banyak bukti yang menunjukan pentingnya komunikasi dalam menunjang keberhasilan.

Begitu juga dengan Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung yang melakukan kegiatan *eksternal* dalam bentuk menyebarkan informasi kepada perwakilan tiap-tiap dinas untuk menerapkan pemahaman akan adanya informasi yang harus dipahami secara seksama berupa kegiatan pelatihan mengenai Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) sebagai pembekalan informasi bagi dinas yang melayani publik.

Menurut Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung, Bapak Bulgan Alamin diadakannya kegiatan Pelatihan berupa Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini guna memberikan pengetahuan mengenai Keterbukaan Informasi Publik kepada perwakilan tiap-tiap Dinas, agar unit kerja dari tiap-tiap dinas dapat memahami akan pentingnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang khususnya melayani informasi publik, pihaknya terus melakukan sosialisasi dengan

memberikan kegiatan dengan bentuk pelatihan mengenai Keterbukaan Informasi Publik.

Hal utama dari kegiatan sosialisasi ini adalah unit kerja atau badan publik yang menjadi target utamanya, agar nantinya dapat dikembangkan kepada seluruh bagian dari tiap-tiap dinasnya sehingga seluruh unit kerja yang menangani pengaduan publik dapat melayani publik dengan baik sesuai dengan ketentuan yang ada pada Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Agar pesan yang akan disampaikan dalam pelatihan dapat diterima dengan baik oleh unit kerja atau badan publik yang menjadi peserta pelatihan maka proses penyampaiannya harus menggunakan komunikasi yang efektif agar dapat di pahami, hal ini dikarenakan agar tercapai tujuan dari informasi yang disampaikan. Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta dapat mengubah sikap komunikan. Artinya kredibilitas komunikator, mendukung pada keefektifitasan komunikasi.

Salah satu dampak dari efektivitas komunikasi tersebut di atas adalah perubahan sikap yang nantinya menimbulkan sebuah pemahaman dari tiap-tiap unit kerjanya atau badan publik yang menjadi peserta yang hadir dalam pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sikap merupakan konstelasi komponen–komponen kognitif, afektif,

dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 1995 : 5).

Maka dari itu dengan diadakannya kegiatan pelatihan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung adanya sebuah pemahaman dari tiap unit kerja atau badan publik yang menjadi pesertanya. Dengan melakukan pelatihan tersebut dalam kegiatan sosialisasi diperlukan adanya komunikasi yang efektif agar terjadinya kesamaan pesan yang disampaikan.

Dikarenakan masih terdapat unit kerja atau badan publik pada masing-masing dinas yang belum memahami pentingnya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Untuk melakukan sosialisasi tersebut dibutuhkan komunikator yang berkompeten dibidangnya. Dan yang diharapkan dari dampak efektivitas komunikasi ialah perubahan sikap dari para unit kerja atau badan publik yang menjadi peserta Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) tersebut menjadi paham.

Dengan bertolak dari latar belakang penelitian di atas, maka peneliti menarik rumusan masalah sebagai berikut : "**Sejauhmana Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja ?".**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian dan rumusan masalah tersebut, maka peneliti mengidentifikasikan masalah yang akan dibahas sebagai berikut :

1. Sejauhmana **Kredibilitas Komunikator** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja ?
2. Sejauhmana **Isi Pesan** yang Disampaikan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja ?
3. Sejauhmana **Media** yang Digunakan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja ?
4. Sejauhmana Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Aspek Kognitif** Unit Kerja ?
5. Sejauhmana Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan

Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Aspek Afektif** Unit Kerja ?

6. Sejauhmana Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Aspek Konatif** Unit Kerja ?
7. Sejauhmana **Efektivitas** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Pemahaman** Unit Kerja ?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Dari permasalahan diatas maka maksud dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menjelaskan mengenai Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui **Kredibilitas Komunikator** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.
2. Untuk Mengetahui **Isi Pesan** yang Disampaikan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.
3. Untuk Mengetahui **Media** yang Digunakan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.
4. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Aspek Kognitif** Unit Kerja.
5. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Aspek Afektif** Unit Kerja.

6. Untuk Mengetahui Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Aspek Konatif** Unit Kerja.
7. Untuk Mengetahui **Efektivitas** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap **Pemahaman** Unit Kerja.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Kegunaan penelitian secara teoritis berguna sebagai pengembang untuk mengembangkan Ilmu Komunikasi secara umum dan Ilmu Humas atau *Public Relations* khususnya mengenai Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Untuk Peneliti

Penelitian ini secara praktis berguna untuk peneliti sebagai aplikasi ilmu yang selama studi diterima secara teori dan diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dalam bidang komunikasi dan *Public Relations.*

2. Untuk Universitas

Penelitian ini secara praktis berguna bagi mahasiswa/i Universitas Komputer Indonesia Bandung (UNIKOM) secara umum, dan untuk mahasiswa/i Ilmu Komunikasi konsentrasi Humas secara khusus sebagai literatur terutama untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian pada kajian yang sama.

3. Untuk Perusahaan

Penelitian ini secara praktis berguna bagi perusahaan sebagai referensi atau evaluasi khususnya mengenai Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerja.

1.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran menjadikan alur pikir lebih terarah menjadikan alat pemikiran yang melatarbelakangi penelitian ini. Disini peneliti mencoba menjelaskan mengenai pokok masalah dari penelitian yang dimaksud untuk menegaskan, meyakinkan dan menggabungkan teori dengan masalah yang peneliti angkat dalam penelitian.

1.5.1 Kerangka Pemikiran Teoritis

Dari penelitian yang diteliti terdapat dua variabel yang akan diteliti yaitu Efektivitas dan Pemahaman. Agar tujuan tercapai dari informasi yang disampaikan, maka Komunikator atau sumber harus bisa melakukan komunikasi yang efektif sehingga pesan yang disampaikannya dapat di pahami bagi penerima informasi.

Komunikasi dikatakan efektif atau berhasil adalah apabila pesan yang disampaikan komunikator itu dapat diterima, adanya saling pengertian sesuai dengan apa yang diharapkan dan diinginkan komunikator serta dapat mengubah sikap komunikan. Artinya kredibilitas komunikator, mendukung pada keefektivitasan komunikasi.

Menurut Andre Hardjana untuk mengukur keefektifan suatu komunikasi, kriteria yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Sumber pesan (*Source*)

   Merupakan orang yang memberikan pesan kepada pengguna.

2. Isi Pesan (*content*)

   Isi pesan yang diterima atau tersalur.

3. Media (*media*)

   Merupakan saluran yang digunakan oleh komunikator atau sumber dalam menyampaikan pesannya kepada komunikan atau pemakai.

4. Penerima atau pemakai (*receiver or uses*)

   Merupakan penerima pesan yang dituju atau komunikan yang dituju. (Hardjana : 2000)

Untuk itu kredibilitas sumber, isi pesan, dan media dijadikan sebagai indikator dari pengertian Efektivitas yang peneliti angkat. Karena diperlukannya sumber yang memang paham dan sesuai dengan bidangnya sehingga sudah dapat menguasai akan informasi yang akan disampaikan karena jika sumber yang tidak sesuai dengan bidangnya maka informasi yang disampaikan tidak akan sesuai dengan harapan sehingga adanya kesalahan penyampaian pesan kepada penerimanya atau komunikan.

Salah satu dampak dari efektivitas komunikasi tersebut di atas adalah perubahan sikap apakah paham atau tidak. Sikap merupakan konstelasi komponen–komponen kognitif, afektif, dan konatif yang saling berinteraksi satu sama lain dalam memahami, merasakan, dan berperilaku terhadap suatu objek (Azwar, 1995 : 5).

Baron, Byrne, dan Myers menyatakan bahwa sikap mengandung tiga komponen yang membentuk struktur sikap, yaitu:

1. Aspek kognitif (komponen perseptual), yaitu komponen yang berkaitan dengan pengetahuan, pemahaman, pandangan, keyakinan, yaitu hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana orang mempersepsi terhadap objek sikap.
2. Aspek afektif (komponen emosional), yaitu komponen yang berhubungan dengan rasa senang atau tidak senang terhadap objek sikap. Rasa senang merupakan hal yang positif, sedangkan rasa tidak senang merupakan hal yang negatif.
3. Aspek konatif (komponen perilaku, atau *action component*), yaitu komponen yang berhubungan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menunjukkan intensitas sikap, yaitu menunjukkan besar kecilnya kecenderungan bertindak atau berperilaku seseorang terhadap objek sikap. (Gerungan, 1996)

Untuk itu Aspek Kognitif, Aspek Afektif dan Aspek Konatif dijadikan sebagai indikator dari Pemahaman yang peneliti angkat. Karena diharapkan adanya pengetahuan, kemampuan, adanya rasa senang, adanya kecenderungan sikap dan pemahaman dari penerima informasi tersebut.

1.5.2 Kerangka Pemikiran Konseptual

Bertolak dari kerangka pemikiran teoritis maka peneliti berusaha mengaplikasikan definisi dan teori yang didapat pada kerangka pemikiran teoritis. Maka dapat dijelaskan bahwa Kegiatan Pelatihan dalam Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi (KIP) yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung mempercaya bidang humas Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung untuk mengatur dan melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut dalam bentuk Pelatihan yang dikhususkan bagi Unit Kerja (Perwakilan masing-masing Dinas yang berada di Kota Bandung).

Bidang humas menunjuk langsung dari Komisi Informasi Pusat sebagai Narasumber atau Komunikator untuk kegiatan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam bentuk Pelatihan. Dimana Narasumber tersebut memang kompeten dibidangnya dengan keahliannya dalam berkomunikasi untuk menyampaikan pesan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) agar penerima informasi tersebut dapat menambah pengetahuan, kemampuan dan khususnya pemahaman dalam bidang keterbukaan informasi publik bagi Peserta sosialisasi.

Seorang sumber atau komunikator juga haruslah memiliki sikap yang baik dan memiliki sifat yang jujur dalam memberikan

informasinya kepada komunikan. Dengan memiliki komunikator yang ahli dibidangnya dan dapat dipercaya maka setidaknya akan memberi kesan senang atas pemberian kegiatan berupa pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dari Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung, dan komunikan (Unit Kerja atau badan publik perwakilan dari tiap Dinas yang berada di Kota Bandung) pun dapat menilai baik atau tidaknya komunikator tersebut dalam menyampaikan pesannya.

Diperlukannya isi pesan yang dikemas semenarik mungkin agar komunikan tidak jenuh dan isi pesan tersebut dibuat mudah dicerna agar para komunikannya dapat memahami isi pesannya sehingga komunikan merasa senang dan menilai dari apa yang telah diberikan oleh komunikatornya. Selain materi yang bagus ditambah dengan gaya menyampaikan pesannya kepada komunikan yang baik maka akan adanya ketertarikan tersendiri bagi komunikan atau unit kerja untuk memperhatikan.

Isi pesan dari kegiatan sosialisasi berupa pelatihan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang dijelaskan kepada unit kerja (perwakilan dari tiap Dinas yang berada di Kota Bandung) diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru untuk dapat dipahami sehingga tidak adanya unit kerja yang belum mengetahui mengenai informasi Undang-Undang Keterbukaan

Informasi Publik (KIP). Agar menunjang penyampaian informasi dalam kegiatan Sosialisasi berupa pelatihan mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Pemerintah Kota Bandung didorong dengan menggunakan media atau alat seperti *infocus* dan modul sehingga para peserta (unit kerja) dapat lebih jelas lagi menerima informasi yang disampaikan.

Media tersebut diharapkan mampu memberikan rasa senang dan penilaian tersendiri terhadap Komunikator yang ditunjuk oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dan isi pesan yang disampaikannyapun dapat diterima oleh komunikannya. Adanya sosialisasi mengenai Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) unit kerja (perwakilan dari tiap-tiap dinas) atau komunikan yang hadir dapat dilihat akan kecenderungan perilakunya untuk berpartisipasi pada kegiatan tersebut. Dan juga dapat melihat kecenderungan yang ditimbulkan oleh unit kerja (perwakilan dari tiap-tiap dinas).

Melihat keberhasilan komunikasi efektif yang dilakukan oleh Komunikatornya melalui pesan yang disampaikan menggunakan *infocus* kepada penerima diharapkan adanya suatu sikap paham dari isi pesan kegiatan sosialisasi tersebut. Dan peserta pelatihan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dapat mengaplikasikan teori yang telah didapat ke dalam kegiatan yang sesungguhnya dalam

menghadapi publik. Sehingga dengan begitu kegiatan sosialisasi yang diselenggarakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung berjalan dengan efektif karena sesuai dengan tujuan.

1.6 Operasional Variabel

Operasional Variabel adalah mengukur konsep abstrak menjadi besaran yang dapat diukur, sedangkan variabel adalah konstruktur yang sifat-sifatnya yang sudah diberi nilai (Rahmat, 2005 : 12). Terdapat dua variabel dalam penelitian ini, yaitu Efekitivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung dan Pemahaman Unit Kerja.

Untuk lebih jelasnya variabel-variabel tersebut dapat dapat di uraikan sebagai berikut :

1. **Variabel X : Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung**

   Indikator X_1 : Kredibilitas Komunikator

   Alat ukur : 1. Keahlian Sumber

   2. Kepercayaan Sumber

Indikator X_2 : Isi Pesan

Alat Ukur : 1. Gaya pesan

2. Materi Pesan

3. Daya Tarik

Indikator X_3 : Media

Alat Ukur : 1. Alat *(Infocus)*

2. Modul

2. Variabel Y : Pemahaman Unit Kerja

Indikator Y_1 : Aspek Kognitif

Alat Ukur : 1. Pengetahuan

2. Kemampuan

3. Pemahaman

Indikator Y_2 : Aspek Afektif

Alat Ukur : 1. Rasa Senang

2. Penilaian

Indikator Y_3 : Aspek Konatif

Alat Ukur : 1. Kecenderungan Perilaku

2. Kesedihan

Untuk lebih jelasnya, variabel – variabel tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 1.6.1

Operasional Variabel

No	Variabel	Indikator	Alat Ukur	Jumlah Item Pertanyaan
1.	**Efektivitas**	• Kredibilitas Komunikator	1. Keahlian Sumber 2. Kepercayaan Sumber	4
		• Isi Pesan	1. Gaya Pesan 2. Materi Pesan 3. Daya Tarik	3
		• Media	1. Alat (*Infocus*) 2. Modul	2
2	**Pemahaman**	• Aspek Kognitif	1. Pengetahuan 2. Kemampuan 3. Pemahaman	3
		• Aspek Afektif	1. Rasa Senang 2. Penilaian	2
		• Aspek Konatif	1. Kecenderungan	2

			Perilaku 2. Kesediaan	

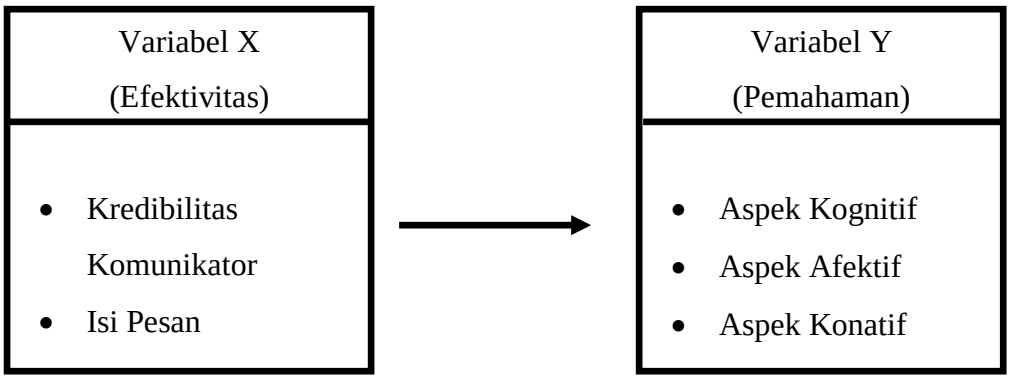
Sumber : Peneliti 2011

1.7 Model Penelitian

Dari uraian sebelumnya, maka peneliti mencoba menyusun dengan model sebagai berikut :

Gambar 1.7.1

Model Penelitian



Sumber : Peneliti 2011

Ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y yaitu adanya pengaruh Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung terhadap Pemahaman Unit Kerja.

1.8 Hipotesis

Hipotesis adalah asumsi atau dugaan mengenai sesuatu hal yang dibuat untuk menjelaskan, hal itu yang sering dituntut untuk melakukan pengecekannya. Hipotesis untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :

Ha : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja baik.

Ho : Jika Efektivitas Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Selanjutnya hipotesis diatas dijabarkan oleh peneliti menjadi beberapa sub hipotesis, yaitu :

Ha_1 : Jika **Kredibilitas Komunikator** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

Ho_1 : Jika **Kredibilitas Komunikator** Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Ha_2 : Jika **Isi Pesan** Yang Disampaikan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

Ho_2 : Jika **Isi Pesan** Yang Disampaikan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Ha_3 : Jika **Media** Yang Digunakan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Baik.

Ho_3 : Jika **Media** Yang Digunakan Pada Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka Pemahaman Unit Kerja Tidak Baik.

Ha_4 : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Aspek Kognitif** Unit Kerja Baik.

Ho_4 : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika

(DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Aspek Kognitif** Unit Kerja Tidak Baik.

Ha_5 : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Aspek Afektif** Unit Kerja Baik.

Ho_5 : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Aspek Afektif** Unit Kerja Tidak Baik.

Ha_6 : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Baik, Maka **Aspek Konatif** Unit Kerja Baik.

Ho_6 : Jika Efektivitas Pelatihan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Tidak Baik, Maka **Aspek Konatif** Unit Kerja Tidak Baik.

1.9 Metode Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif banyak digunakan untuk menguji suatu teori, untuk menyajikan suatu fakta atau mendeskripsikan statistik, untuk menunjukkan hubungan antar variabel, dan ada pula yang bersifat mengembangkan konsep, mengembangkan pemahaman atau mendeskripsikan banyak hal, baik itu dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial.

Tipe penelitian kuantitatif menurut Sugiono : digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran atau kelas peristiwa pada waktu tertentu. Sehingga melalui metode ini akan diperoleh data dan informasi tentang gambaran suatu fenomena, fakta, sifat serta hubungan fenomena tertentu secara komperehensif dan integral. Dengan demikian pengulangan dalam penelitian kuantitatif dilakukan dalam

rangka mendapatkan konsistensi atau reliabilitas data penelitian yang ada. (Sugiono, 2003 : 19).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode survei. Metode survei adalah metode pengumpulan data primer dengan memperoleh secara langsung dari sumber lapangan penelitian. Biasanya pengumpulan data atau informasi dan fakta lapangan secara langsung tersebut melalui koesioner (*questionnair*) dan wawancara (*interview*) baik secara lisan maupun tertulis yang memerlukan adanya kontak secara tatap muka (*face to face contact*) antara peneliti dengan respondennya (subjeknya). (Ruslan 2008 : 22)

1.10 Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Angket

   Angket atau *kuesioner* merupakan serangkaian atau daftar pertanyaan yang disusun secara sistematis, untuk diisi oleh responden. Selain diisi, angket dikembalikan kepetugas atau peneliti. Angket terdiri dari angket langsung tertutup, angket langsung terbuka, angket tak langsung tertutup, angket tak langsung terbuka. Angket langsung tertutup adalah angket yang dirancang sedemikian rupa untuk merekam data tentang keadaan yang dialami oleh responden. Semua alternatif jawaban yang harus dijawab responden telah tertera dalam angket tersebut.

Angket langsung terbuka adalah daftar pertanyaan yang dibuat dengan sepenuhnya memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab keadaan yang dialami responden, tanpa ada alternatif jawaban dari peneliti. Angket tak langsung tertutup dikonstruksikan untuk menggali atau merekam data mengenai apa yang diketahui responden perihal objek dan subjek tertentu, serta data tersebut tidak dimaksud perihal diri responden bersangkutan. Disamping itu, alternatif jawaban telah disiapkan sehingga responden tinggal memilih jawaban mana yang sesuai untuk dipilih. Angket tak langsung terbuka dikonstruksi dengan ciri-ciri yang sama dengan angket langsung terbuka, serta disediakan kemungkinan atau alternatif jawaban sehingga responden harus memformulasikan sendiri jawaban yang dipandang sesuai (Bungin, 2005:123-126).

Mengumpulkan data dengan cara memberikan daftar pernyataan yang sehubungan dengan masalah yang diteliti, untuk diisi oleh para responden. Peneliti menyebarkan daftar pernyataan kepada Unit Kerja (Peserta). Angket yang digunakan adalah angket tertutup yaitu daftar pernyataan yang sudah memiliki alternatif jawaban, responden tinggal memilih alternatif jawaban yang dianggap sesuai.

2. Wawancara

Wawancara yaitu tanya jawab secara terbuka dan langsung kepada responden yang menjadi sampel dalam penelitian ini. Wawancara atau *interview* adalah sebuah proses memperoleh

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab dengan bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarainya. (Nazir, 1999 : 234).

Wawancara yang dilakukan adalah dengan mengadakan tanya jawab secara tatap muka atau lisan dengan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung. Bentuk wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, yaitu semua daftar pertanyaan-pertanyaan telah disusun terlebih dahulu dalam daftar dengan maksud agar semua pertanyaan tidak menimpang dari tujuan penelitian.

3. Studi Pustaka

Merupakan usaha untuk memperoleh informasi dengan cara menelaah bahan bacaan atau referensi yang sesuai dengan permasalahan penelitian, baik dari buku-buku maupun internet sehingga didapatkan teori-teori yang dapat mendukung analisis penelitian.

4. Internet Searching

Internet Searching atau pencarian secara *online* adalah pencarian dengan mengunakan komputer yang dilakukan melalui internet dengan alat atau *software* pencarian tertentu pada *server-server* yang tersambung dengan internet yang tersebar di berbagai penjuru dunia. (Sarwono, 2005 : 229).

Pada penelitian ini pengumpulan data dilakukan secara *online* dengan mencari dan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang diteliti. Diantaranya melalui alamat-alamat *website* seperti www. google.com, dan lain-lain.

5. Dokumentasi

Studi dokumenter merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen yang telah diperoleh kemudian dianalisis (diurai), dibandingkan dan dipadukan (sintesis) membentuk satu hasil kajian yang sistematis, padu dan utuh.

Jadi studi dokumen tidak sekedar mengumpulkan dan menuliskan atau melaporkan dalam bentuk kutipan-kutipan tentang sejumlah dokumen yang dilaporkan dalam penelitian adalah hasil analisis terhadap dokumen-dokumen tersebut.

1.11 Teknik Analisis Data

Langkah-langkah bagaimana analisis data yang sudah didapat dari pengumpulan data. Setelah memperoleh data dalam melakukan penelitian, maka selanjutnya akan dilakukan analisis data sebagai berikut :

1. Menyeleksi data, memeriksa kelengkapan dan kesempurnaan data serta kejelasan data.
2. Melakukan klasifikasi data yaitu mengelompokkan data dan dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya.

3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas pada angket yang telah disebar sebelumnya. Valid berarti instrumen (angket pernyataan) tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur sedangkan reliabilitas menunjukkan pada adanya konsistensi dan stabilitas nilai hasil skala pengukuran tertentu.
4. Data dimasukkan ke dalam *cooding book* (buku coding) dan *coding sheet* (lembar coding).
5. Melakukan tabulasi data yaitu menyajikan data dalam tabel induk kemudian ke dalam tabel tunggal sesuai tujuan analisa data.
6. Data yang ditabulasi, dianalisis.

Dalam pengolahan data, peneliti menggunakan program SPSS 13.0 (*Statictical Product and Service Solutions*) yang merupakan program aplikasi yang digunakan untuk melakukan perhitungan statistik dengan menggunakan komputer. Untuk menganalisa hubungan antara variabel X dan variabel Y digunakan teknik analisa Korelasi *Rank Spearman* :

Rumus :

$$rs = 1 - \frac{6\sum di^2}{n(n^2 - 1)}$$

Sumber : Purwanto, 2010 : 230

Keterangan :

rs : Korelasi *rank spearman*

di : Selisih dua *ranking*

n : Jumlah sampel

Dimana : $\sum di^2 = \sum[r(xi) - (yi)]^2$. Sedangkan untuk menganalisa pengaruh Koefisien Determinasi (KD) antara variabel X dan varibel Y, digunakan rumus :

$$KD = r^2 \text{ X } 100\%$$

Sumber : Modul SPSS 2010

Keterangan :

KD = Koefisien Determinasi

rs = Hasil Korelasi *Rank Spearman*

Untuk menguji hipotesis, digunakan rumus uji t, yaitu :

$$t_{hitung} = \frac{r\sqrt{(n-2)}}{\sqrt{(1-r^2)}}$$

Sumber : Ruslan, 2003 :268

Keterangan :

r = Besarnya Korelasi

n = Besarnya Sampel

Kriteria keputusan sebagai berikut :

Jika t_{hitung} > t tabel, maka H0 diterima dan Ha ditolak

Jika t_{hitung} < t tabel, maka H0 ditolak dan Ha diterima.

a. Uji Validitas

Sebelumnya digunakan untuk mengukur variabel-variabel dalam penelitian, terlebih dahulu dilakukan pengujian terhadap angket dengan analisis validitas dan reliabilitas agar data yang diperoleh dapat dipercaya dan diakui kebenarannya.

Pengujian validitas dilakukan dengan mengkorelasikan skor jawaban responden dari setiap item pernyataan dengan jumlah total jawaban responden atas seluruh pernyataan. Koefisien korelasi tiap item akan dibandingkan dengan 0,3 (df). Jika nilai korelasi suatu item / pernyataan lebih kecil atau sama dengan 0.3, maka pernyataan tersebut tidak valid dan harus dikeluarkan dari pengujian yang dilakukan. Hanya item yang memiliki nilai korelasi lebih tinggi dari 0.3 diikutsertakan dalam pengujian (Sugiyono, 2003:124).

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauhmana suatu hasil pengukuran *relative* konsisten apabila alat ukur digunakan berulang kali. Pengujian reliabilitas kuesioner dilakukan dengan mencari korelasi menggunakan teknik belah dua (*split-half*) dengan membagi item-item pernyataan responden menjadi belahan genap dan belahan ganjil.

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam uji reliabilitas adalah :

1. Item-item yang valid dikumpulkan dan yang tidak valid dibuang.
2. Membagi item-item yang valid tersebut menjadi dua belahan berdasarkan nomor ganjil dan genap.
3. Skor untuk masing-masing item pada tiap belahan dijumlahkan. Langkah ini akan menghasilkan dua skor total untuk masing-masing responden yakni skor total untuk belahan ganjil dan skor total belahan genap.
4. Mengkorelasikan skor total belahan ganjil dan belahan genap dengan menggunakan teknik korelasi *product moment pearson*.
5. Selanjutnya adalah mencari angka reliabilitas untuk keseluruhan item tanpa dibelah dua. Angka korelasi yang diperoleh harus lebih rendah daripada angka korelasi yang diperoleh jika keseluruhan
6. Item tidak dibelah.

Perhitungan korelasi antara skor belahan ganjil dengan skor belahan genap diperoleh melalui perhitungan uji reliabilitas dengan teknik belah dua (*Split-Half*), yang menggunakan rumus :

$$r.tt = \frac{n(\sum XY) - (\sum X . \sum Y)}{\sqrt{\{n\sum X^2 - (\sum X)^2\}\{n\sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Sumber : Modul SPSS 2010

Dimana :

n = jumlah responden

x = skor variabel (jawaban responden)

y = skor total variabel untuk responden

Selain menggunakan rumus dan ketentuan-ketentuan diatas, uji validitas dan reliabilitas data penelitian dalam penelitian ini, juga di uji dengan menggunakan perhitungan *r-alpha* melalui analisa SPSS versi 13.

Selanjutnya adalah dengan menggunakan kriteria, sebagai berikut :

1. Jika r Alpha positif dan > 0,9 maka butir pernyataan tersebut reliabel, atau
2. Jika r Alpha positif dan > r tabel, maka butir pernyataan tersebut juga reliabel, atau
3. Jika r Alpha positif dan < r tabel, maka butir pernyataan tersebut tidak reliabel

Berdasarkan kriteria diatas, maka pada data terlihat bahwa semua r Alpha positif dan > dari 0,9 dengan demikian semua butir pernyataan pada angket penelitian sudah **reliabel.**

1.12 Populasi dan Sampel

1.12.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan objek yang akan diamati. Objek yang diamati dapat berupa benda hidup maupun benda mati, dimana sifat-sifat yang ada dalam objek tersebut dapat diukur atau diamati. Populasi terdapat dua bagian yaitu ada populasi yang tak terbatas dan populasi yang dapat diketahui jumlahnya.

Hasil pengukuran atau karakteristik dari populasi disebut parameter yaitu harga rata-rata hitung (*mean*) dan simpangan baku (standar deviasi). Penjelasan di atas menyimpulkan bahwa populasi diteliti harus didefenisikan dengan jelas, termasuk didalamnya ciri-ciri dimensi waktu dan tempat.

Populasi dalam penelitian ini adalah peserta yang hadir dalam kegiatan pelatihan mengenai Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berjumlah 50 orang dari perwakilan Dinas-dinas yang berada di Kota Bandung dan Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) ini diadakan diruang serbaguna Pemerintah Kota Bandung.

Hal tersebut dilakukan bila jumlah populasi relatif kecil. Adapun populasi tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.12.1.1

Daftar Peserta Kegiatan Pelatihan Sosialisasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)

No	Nama	Jabatan
1.	Arief Fadillah	Staf Ahli Hukum PD.BPR
2.	Dadang	Staf Bidang Umum
3.	Rosyidi	Binamarga & Peg DBMP
4.	Aang	Staf Bagian Hukum
5.	Ine Indri Yani	BKD
6.	Tati Q	RSKGM
7.	Nata Jaya	PD. Kebersihan
8.	Feri R	PD. Kebersihan
9.	Ateng B	PD. Kebersihan
10.	Dharmawan	DPKAD
11.	Fajar Kurniawan	Inspektorat
12.	Dadang I	DISDIK
13.	Sugiyanto	Rs. Ibu dan Anak
14.	Dadan S	RSUD
15.	Kusnendar	DKK
16.	Bambang Suryaman	Distarcip
17.	Edy Waluyo	Bagian TU
18.	Wawan Dermawan	PDAM
19.	Asep S	Kesra & Kemasyarakatan
20.	Juana S	Pertamanan
21.	Hendar Suhendar	Sekretariat DISPENDA
22.	Ajuain S	Sekretariat DISHUB
23.	Susy R	Sekretariat DISNAKER
24.	Popong W Nuraeni	Sekretariat BPPKB

25.	Ahyani R	Sekretariat DINKES
26.	Elly Wasuari	Sekretariat DISTANHP
27.	M.Rohmana	BPLH
28.	Supardi	DISDIK Capil
29.	Puji W	PD. Pasar Bermartabat
30.	Erna	BAPPEDA
31.	Lusi	Bagian Perekonomian
32.	Dienie H	DISBUDPAR
33.	Shpirenaning	DISBUDPAR
34.	Tuti Erwina	Dinas Sosial
35.	Rina Mariana	BPPT
36.	H. Seni Bakhtiyar	BPPT
37.	Azis Rachman	BKPPM
38.	Irviyanti	Pranata Humas DISDIK
39.	M. Afghan F	Analis Hukum DISDIK
40.	Dedih S	Bagian Pembangunan & SDA
41.	Een Haryani	DISKOB UKM Perindag
42.	Sonjaya Oman	DISKOB UKM Perindag
43.	Iis N	DISKAR
43.	Sri S	PUSARDA
44.	Nurhaidi	Bagian PENUM
45.	Deden S	DISPORA
46.	Ajie S	DISPORA
47.	M. Tatang A	SEKWAN
48.	Alwansyah N	Sekretariat DISKAR
49.	Suharyanto	SATPOL PP
50.	Dedy K	Bagian Organisasi

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) 2011

1.12.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi objek penelitian. Hasil pengukuran atau karakteristik dari sampel disebut statistik. Sampel adalah sebagian yang diambil dari populasi (Sudjana, 1996). Sedangkan menurut Kartono dalam Sugiono (2003) mengatakan, sampel adalah bagian yang akan dipelajari dan diamati untuk diteliti.

Kartono mengatakan bahwa untuk populasi berjumlah antara 10-100 orang/satuan, seyogyannya diambil 100%. Alasan perlunya pengambilan sampel adalah sebagai berikut :

1. Keterbatasan waktu, tenaga dan biaya.
2. Lebih cepat dan lebih mudah.
3. Memberi informasi yang lebih banyak dan dalam.
4. Dapat ditangani lebih teliti.

Tujuan pengambilan sampel supaya sampel yang diambil dapat memberikan informasi yang cukup untuk dapat mengestimasi jumlah populasinya. Memilih teknik yang akan dipakai dalam pengambilan sampel merupakan suatu upaya penelitian agar menemukan sampel yang mewakili serta dapat menggambarkan populasinya.

Peneliti menggunakan Total Sampling karena sampel yang diambil oleh peneliti ialah seluruh populasi (Sugiono, 2003 : 58) yaitu seluruh peserta yang menghadiri kegiatan pelatihan Sosialisasi

Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang berjumlah 50 orang dari perwakilan dari masing-masing Dinas yang berada di Kota Bandung.

1.13 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.13.1 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilaksanakan di Divisi Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung, yang beralamat di Jalan Wastukencana No. 2 Telp. (022) 4230393 Bandung.

1.13.2 Waktu Penelitian

Waktu Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan dimulai pada bulan Februari 2011 – Juli 2011. Dengan judul Efektivitas Sosialisasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung Terhadap Pemahaman Unit Kerjanya. Adapun waktu penelitian ditampilkan dalam tabel :

Tabel 1.13.2.1

Waktu dan Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Februari 2011				Maret 2011				April 2011				Mei 2011				Juni 2011				Juli 2011			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Penulisan Bab 1																								
	Bimbingan																								
3	Seminar UP																								
4	Penulisan Bab II																								
	Bimbingan																								
5	Penulisan Bab III																								
	Bimbingan																								
6	Pengumpulan Data																								
	Bimbingan																								
7	Pengolahan Data																								
	Penulisan Bab IV																								
	Bimbingan																								

8	**Penulisan Bab V**																							
	Bimbingan																							
9	**Penyusunan Seluruh Bab**																							
10	**Sidang kelulusan**																							

Sumber : Peneliti 2011

1.14 Sistematika Penulisan

Dalam usaha memberikan gambaran secara sistematis, peneliti membagi susunan skripsi kedalam lima bab yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Bab awal dari keseluruhan skripsi yang berisikan antara lain Latar Belakang Penelitian, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, Operasional Variabel, Model Penelitian, Hipotesis Penelitian, Metode Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Teknis Analisis Data, Populasi dan sampel, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada Bab ini peneliti mencoba menunjukan hasil penelitian dan aspek teoritis melengkapi dalam mengkaji permasalahan, dimulai dari Tinjauan Umum Tentang Ilmu Komunikasi, Tinjauan Tentang

Komunikasi Organisasi, Tinjauan Tentang *Public Relations,* Tinjauan Tentang Efektivitas, Tinjauan Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), dan Tinjauan Tentang Pemahaman Unit Kerja.

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini dijelaskan secara singkat gambaran umum perusahaan tempat sumber data primer informasi penelitian, yaitu Dinas Komunikasi dan Informatika (DISKOMINFO) Pemerintah Kota Bandung termasuk di dalamnya bagian *Public Relations* dan gambaran Mengenai Unit Kerja.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai cara pengumpulan data melalui kuesioner yang disebar dan telah diisi oleh responden, serta pengolahan data dengan menggunakan metode yang telah ditetapkan sebelumnya. Selain itu bab ini akan menjelaskan mengenai analisis dan hasil pengolahan data yang diperoleh.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.